

Daftar Pustaka

- Amarudin, & Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baedhowi. (2004). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. *Disertasi Departement Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia*.
- bappeda.jogjaprovo.go.id. (2019). *Tabel data penyandang disabilitas di DIY*. Yogyakarta.
- Brandão, C. (2015). P. Bazeley and K. Jackson, Qualitative Data Analysis with NVivo (2nd ed.). *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Colbran, N. (2010). *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Di Indonesia*.
- Dian, P. (2018). *Aksesibilitas Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Cacat*. 1–18.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Hanindita Graha Widya, Ed.). Yogyakarta.
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Goggin, M. et al. (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation* (Scoot, Ed.). USA: Foresmann and Company.
- Grindle, M. (Ed. . (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Retrieved from www.jstor.org/stable/j.ctt1m323qj%0A
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 23(4), 652–671.
- Hammaa, L. (2017). Kebijakan Pemerintah DIY Dalam Upaya Peningkatan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1(1), 1188–1197. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Islamy, M. I. (1998). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasim, E. V. A. R., Fransiska, A., Lusli, M., Siradj, O., Disabilitas, P. K., Sosial, F. I., ... Indonesia, U. (2010). *AnaLisi situasi penyandang disabilitas di Indonesia : sebuah desk-review*. (November).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi, & Sofwani, A. (2018). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. Retrieved from <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Nuraviva, L. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota

- Surakarta. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1–28.
- Organisasi perburuhan Internasional Jakarta. (2013). *Pedoman ILO tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja*.
- Pemerintah, P. (1998). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998*. 1–27.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. , (2012).
- Pramadita Hasbullah, R. (2013). *Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapat Pekerjaan Yang Layak Tanpa adanya Diskriminasi*. 10(854), 177–187.
- Pratomo, D. T., & Fadli, M. (2015). *Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas*. 1–27.
- Putriani, T. (2011). *Implementasi Peraturan Daerah No . 2 Tahun 2008 (Kasus tentang kesempatan kerja difabel oleh Pemerintah Kota Surakarta)*. (2), 1–37.
- Quade, E. . (1984). *Analysis For Public Decisions*. Elsevier Science Publishers.
- Ripley, R. B. and G. A. F. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy* (second edi). Chicago-Illionis: the Dorsey Press.
- Rostanti, Q. (2019, September). Menaker Minta Perusahaan Perhatikan Kuota Pekerja Disabilitas. *Detik.com*, p. 1. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum>
- Sabatier, P. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy*, 6(h), 21–48.
- Sayyidah, A. N. (2015). Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Di Tempat Magang Kerja (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta). *Inklusi*, 2(1), 63–86.
- Sinambela, L. P. D. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik : teori, kebijakan, dan implementasi* (Cet.3). Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1–19.
- Tosirin, A. (2017). Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1(1), 1188–1197. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Tufy, S. (2018). Pengaruh Aksesibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Difabel. *Jurnal Manajemen Publik*, 4(2), 1–28.
- Utami, D. (2015). *Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta*. 3, 67–83.
- yogyakarta.bps.go.id. (2019). Sosial dan Kependudukan. Retrieved from <https://yogyakarta.bps.go.id/pencarian.html>

Zulkarnain, R. (2008). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities). *The Visual Computer*, 24(3), 155–172.